

Dampak dan Strategi UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Menghadapi *The “New Normal”*

Endah Marendah Ratnaningtyas

Mahasiswa Program Doctor Universitas Teknologi Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 11, No. 1, Juni 2020

Halaman : 63 - 70

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Impact, Strategy, MSMEs, New Normal

JEL classifications :

Contact Author :

endahmarendah@unmaha.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities capable of expanding employment opportunities, providing broad economic services to the community, playing a role in the process of equalization and increasing community income, encouraging economic growth, and playing a role in realizing national stability.

The purpose of this study is to determine how MSMEs increase competitiveness in facing the "New Normal". The method used in this study is a qualitative method. The technique of determining the informants was done by purposive sampling.

The data analysis process is done by reducing data and presenting the data that has been obtained for later drawing conclusions.

The results of this study indicate that MSMEs continue to improve their competitiveness amid the pandemic that is still occurring in Indonesia, although the marketing is still relatively small, but MSME players continue to improve the quality of their products to welcome the "new normal" that will be carried out, so that the wheels the economy started again.

PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu, saat ini kita menghadapi pandemi global bernama COVID -19, sebuah virus yang memiliki tingkat penyebaran sangat cepat. Keadaan ini akan berdampak pada semua lapisan masyarakat, dari yang muda sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya.

Dampak yang paling terasa adalah ekonomi. Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya sehingga harus merumahkan mereka. Dampak COVID-19 menjadi semakin terasa bagi Indonesia karena sektor UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak.

Keluhan dari para pelaku UMKM adalah penjualan yang menurun, sulit memperoleh bahan baku, serta distribusi yang menjadi terhambat. Walau begitu, tidak semua UMKM mengalami penurunan.

Riset dari LPEM UI menyebutkan ada beberapa UMKM yang bersinar, yaitu UMKM yang memproduksi produk-produk herbal, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini disebabkan masyarakat yang mulai mengganti pola hidup menjadi lebih sehat.

Akibat penurunan ekonomi ini, sejumlah negara pun perlahan-lahan menerapkan “New Normal” guna mendorong kembali roda perekonomian. Mereka secara perlahan-lahan mulai mencabut pembatasan sosial demi menyelamatkan pekerjaan masyarakat dan memulai kembali aktivitas perekonomian.

Tidak terkecuali Indonesia, pemerintah mulai mengkampanyekan “new normal” dengan mengizinkan karyawan berusia dibawah 45 tahun untuk kembali bekerja. “New normal” akan ditandai dengan pola produksi dan konsumsi yang baru, dengan begitu digitalisasi dan otomatisasi yang semakin dipercepat. Lantas, strategi apa yang harus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) gunakan untuk menghadapi “new normal” ? solusi bagi para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terletak pada satu kata, yaitu integrasi.

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu memiliki manajemen stock produk yang terintegrasi dengan pembelian dan penjualan, sehingga mampu memantau persediaan barang dengan cepat dan tepat.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu mengintegrasikan pengiriman barang dagangannya, baik itu dalam kota, antar kota, sampai antar negara.
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat terintegrasi dengan sistem komunikasi yang cepat kepada pelanggan, meskipun tidak dapat bertatap muka langsung dengan pelanggan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menggunakan Whatsapp, Line, dan sebagainya.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu mengintegrasikan sistem pembayaran mereka dengan sistem transfer bank, e-wallet (Dana, OVO, dsb), dan juga cash on delivery (COD).

Integrasi di atas dapat bisa langsung digunakan oleh UMKM apabila bergabung dengan marketplace, seperti bukalapak, tokopedia, shopee, dll. Pada marketplace tersebut, para UMKM dapat melakukan pengintegrasian yang saya sebutkan di atas. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mencatat stock barang yang akan otomatis berkurang jika terjadi penjualan dan mencatat secara otomatis jumlah penjualan atas tiap produk yang ditawarkan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga dapat menyediakan pilihan pengantaran barang seperti melalui JNE, TIKI, atau GoSend untuk layanan pengiriman kilat. Pada marketplace UMKM juga memiliki fitur chat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari calon pembeli. Dan yang terakhir, UMKM juga dapat menyediakan pilihan pembayaran mulai dari transfer bank, e-wallet, bahkan sampai dengan pembayaran kredit.

Tantangan dari setiap UMKM untuk solusi ini adalah banyak UMKM yang tidak mengerti bagaimana mendigitalisasikan usaha mereka. Mereka tidak melek teknologi sehingga sulit untuk memulai. Belum lagi masalah pemasaran digital yang perlu dikuasai juga oleh UMKM. Peran ini dapat diambil oleh UMKM koperasi yang menaungi UMKM untuk membantu dan membimbing para pengusaha ini dalam mendigitalisasikan usahanya.

Dengan menyesuaikan metode penjualan menjadi tidak konvensional lagi, diharapkan UMKM mampu bertahan ditengah situasi “new normal” yang akan segera kita hadapi, bahkan dapat meraup keuntungan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menjual produknya ke pasar yang lebih luas tanpa harus menyewa toko, outlet dan lain sebagainya. Dengan berjayanya UMKM, perekonomian negara juga akan terangkat.

METODE

Pemerintah siap menerapkan skenario new normal. Skenario new normal dengan menjalankan tingkat kedisiplinan kesehatan tinggi agar aman dari Covid-19 dan produktivitas bisa terjaga yang berujung pada jalannya roda perekonomian.

Terlebih lagi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah merilis Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Lalu bagaimana kesiapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)? berikut kesiapan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi new normal:

1. Tak Semua Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dapat Menerapkan Protokol New Normal

Untuk kesiapannya tidak semua Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa menjalankan panduan kesehatan yang sudah ditetapkan. Hal itu, karena tidak semua bidang usaha memiliki pola kerja dan kemampuan keuangan yang sebanding. Misalnya saja bagi usaha mikro dan kecil. Apabila bisnis usaha menengah atau ritel modern masih bisa. Tapi jika kebijakan itu yang menambah biaya lebih untuk menerapkan itu mungkin sulit dijalankan. terutama untuk pedagang pasar masih sulit

2. Protokol Kesehatan Mudah Dijalankan

Untuk menjalankan aturan dasar tentang menjaga kebersihan diri sendiri dan mencegah penularan sangat mungkin dijalankan. Terkait memakai masker, cuci tangan, social distancing itu yang paling penting yang wajib dijalankan.

3. Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dukung New Normal

Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) mendukung kebijakan new normal yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Pasalnya hal itu untuk menggerakkan kembali perekonomian dalam negeri. Ekonomi harus terus berjalan, kesehatan juga harus tetap diperhatikan.

4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)

Jumlah populasi UMKM di Indonesia sekitar 64 juta. Sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Koperasi dan UMKM akan terus membuka kerja sama dengan platform e-commerce, warung tradisional, koperasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun pihak terkait lainnya, baik online maupun offline, untuk UMKM di Tanah Air. Khusus dalam kolaborasi dengan platform e-commerce, menggunakan skema non-APBN. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tengah berkonsentrasi penuh membantu koperasi dan UMKM untuk melewati masa-masa pandemi Covid-19. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa di antara UMKM yang bertahan, bahkan tumbuh di tengah masa pandemi, adalah mereka yang sudah terhubung dengan platform online. Platform online ini sekaligus membantu masyarakat luas untuk menerapkan physical distancing, sambil tetap memenuhi kebutuhan masing-masing dengan menjaga berlangsungnya aktivitas ekonomi.

5. 87% UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) Masih Tertinggal Dalam Digital

Di era digital saat ini. Jumlah populasi UMKM di Indonesia sekitar 64 juta. Sehingga pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Saat ini 87% UMKM kita masih tertinggal dalam digital (online).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi corona (Covid-19) benar-benar memukul bisnis, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mereka harus menghadapi kenyataan anjloknya pemasaran akibat berkurangnya pembeli yang bertumpuk dengan terpukulnya daya beli masyarakat.

Kondisi ini bukan mengada-ada. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga pertengahan April ini tercatat sekitar 37.000 pelaku UMKM melaporkan keterpurukan yang mereka alami. Jumlahnya tentu akan membesar seiring lamanya pembatasan sosial berskala besar (PSPB) di sejumlah daerah.

Pemerintah harus segera merespons jeritan pelaku UMKM dengan menyelamatkan mereka, baik dengan memberi bantuan sosial untuk kehidupan mereka sehari-hari maupun bantuan modal agar mereka bisa tetap bisa menggerakkan usahanya.

Langkah penyelamatan sudah dimulai, pemerintah menyiapkan program perlindungan bagi UMKM terdampak corona. Telah di buat skema penyelamatan UMKM. Pembahasan sudah semakin mengerucut dan ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi utamanya di sektor UMKM, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.

Hal yang sangat mendasar harus dilakukan pemerintah dalam kebijakan penyelamatan UMKM, yakni pendataan. Mana UMKM yang miskin, setengah goyang, mana yang survive, mana yang kuat, mana yang tahan pandemi dan tidak. Pendataan itu penting supaya kalau ada bantuan, relaksasi, stimulus, itu bisa tepat sasaran.

Penyelamatan UMKM di sektor pangan harus didorong dengan diberikan afirmasi kebijakan, apalagi FAO sudah memberikan peringatan jika pandemi berlangsung lama maka akan terjadi krisis pangan. Maka UMKM yang bekerja di bidang pangan harus di beri pendampingan, stimulus modal, relaksasi. UMKM harus jadi primadona karena menyerap banyak tenaga kerja.

BUMN pangan harus membeli hasil produksi UMKM khususnya di bidang perkebunan, peternakan, perikanan dan pertanian. Ini dalam rangka menstabilkan harga. Jadi BUMN pangan yang harus membeli. Di samping memenuhi stok pangan juga memberdayakan sektor-sektor yang relatif bisa survive dibanding sektor lain.

Sebagai informasi, untuk penyelamatan UMKM ini pemerintah memiliki lima skema. Skema pertama diarahkan untuk pelaku UMKM yang termasuk kategori miskin dan rentan terdampak corona. Kelompok ini masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial. Harus di pastikan bahwa UMKM ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos. Baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja.

Skema kedua berupa insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp. 4,8 miliar per tahun. Untuk itu, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5% menjadi 0%. Kebijakan ini berlaku selama periode enam bulan, dimulai dari April hingga Desember nanti.

Selanjutnya skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program. Implementasinya bisa berupa penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultramikro, ataupun UMi dan PNM Mekaar. Kelompok ini jumlahnya 6,4 juta. Termasuk debitur Pegadaian yang jumlahnya 10,6 juta debitur.

Program lain dalam skema ini adalah penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari lembaga pengelola dana bergulir (LPDP) dan penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Yaitu LPM UMP ,

lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan, BLU pusat pembiayaan pengelolaan hutan dan calon petani calon lokasi di Kementerian Pertanian. Juga ada program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemda.

Akan di siapkan skema perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Bantuan modal kerja darurat ini harus dirancang dengan baik. agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini.

Dari data yang dimiliki pemerintah terdapat 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Kemudian terdapat 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

Karena itu, yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan.

Program KUR. Sekaligus ini akan mendorong inklusi keuangan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lain.

Satu lagi skema yang disiapkan pemerintah adalah mewajibkan kementerian, lembaga, BUMN dan pemda harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM. Terutama pada tahap awal recovery. Konsolidasi usaha ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik ini di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga.

Pemerintah juga akan menyelenggarakan realokasi anggaran pemda juga diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini. Sehingga di harapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Skema Bunga Kredit

Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM. Hal ini dilakukan untuk melindungi UMKM yang terdampak pandemi corona. Skemanya, pemerintah menyubsidi bunga kredit yang besarnya tiga bulan pertama adalah 6%, kemudian tiga bulan kedua 3%. Untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan untuk kredit-kredit yang Rp. 10 juta sampai Rp. 500 juta.

Untuk kredit Rp. 500 juta ke atas sampai Rp. 10 miliar akan diberikan bertahap. Pada tiga bulan pertama 3%, tiga bulan kedua 2%. Kemudian untuk kredit di bawah Rp10 juta atau nasabah-nasabah UMi (pembiayaan ultra mikro), Mekaar (PNM Membina Keluarga Sejahtera), Pegadaian atau yang lain itu diberikan 6% selama enam bulan.

Jumlah debitur di semua tingkatan pinjaman sebanyak 60 juta. Namun, di luar itu pemerintah akan menyiapkan skema bagi UMKM yang belum tercatat sebagai nasabah di sistem keuangan perbankan maupun mikro.

Untuk di lembaga pengelola dana bergulir (LPDB, kemudian di lembaga seperti UMi, PNM Mekaar. diberi kesempatan untuk aktif mendaftar dan memberikan tambahan untuk potensi ekspansi penyaluran kredit seperti di KUR kepada 3 juta nasabah baru. Lalu UMi sekitar 550.000.

Peminjam yang kreditnya di bawah Rp. 500 juta berjumlah sekitar 28,3 juta rekening atau nasabah. Pemerintah akan menanggung bunga para peminjam ini untuk tiga bulan pertama senilai 6%. Kemudian pada tiga bulan kedua pemerintah akan menanggung 3% bunga.

Adapun untuk peminjam dengan kredit Rp. 500 juta - 10 miliar, pemerintah akan menyubsidi 3% di tiga bulan pertama. Pada tiga bulan selanjutnya akan ditanggung bunganya sebesar 2%. Bank-bank bisa memberikan restruktur dengan penundaan pokok selama enam bulan. Kemudian para debitur bisa mendapat subsidi bunga dari pemerintah.

Fasilitas bagi peminjam KUR akan sama dengan kredit dengan nilai di bawah Rp. 500 juta. Sedangkan untuk kredit ultramikro seperti Mekaar ataupun UMi akan mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Untuk ultramikro pinjaman Rp. 5 juta - 10 juta atau di bawah itu, termasuk kredit Mekaar 6,08 juta, UMi 1 juta debitur, dan Pegadaian 10,6 juta debitur. Mereka ini akan mendapatkan juga bantuan subsidi bunga pemerintah. Nasabah UMi, Mekaar, dan Pegadaian akan mendapatkan pembayaran bunga pemerintah selama enam bulan sebesar 6%.

Total kredit yang akan ditunda pokoknya baik untuk KUR, UMi, ataupun Mekaar sebesar Rp. 105,7 triliun. Untuk BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, total penundaan angsuran diperkirakan mencapai Rp. 165,48 triliun. Dengan demikian, total kedua penundaan angsuran mencapai Rp. 271 triliun dari total angsuran yang ditunda selama enam bulan.

Peminjam lain, seperti koperasi yang belum mendapat akses UMi, berjumlah 1,7 juta. Adapun nasabah lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) mencapai 30.000 peminjam. UMKM yang di pemda, petani dan nelayan semuanya berjumlah 6,29 juta. Itu juga akan mendapat subsidi bunga 6% selama enam bulan dari pemerintah. Total di perkirakan outstanding Rp. 16,3 Triliun dan penundaan Rp. 13,87 triliun.

Pemerintah akan minta kepada bank untuk membuat proposal bagi para peminjam yang memenuhi syarat. Debitur yang memenuhi syarat adalah yang terdampak corona. Untuk KUR dengan nilai pinjaman sampai Rp. 500 juta, menengah Rp. 10 miliar, dan UMi yang kecil, harus memiliki track record yang baik.

Pembayaran kredit dengan kategori lancar, yaitu kolektibilitas 1 sampai 2 di harapkan memiliki NPWP dan bayar pajak baik. Dan tidak masuk daftar hitam OJK. Bank-bank ini dengan proposal tersebut yang telah diverifikasi BPKP. Kemudian bisa berikan subsidi bunga.

Relaksasi kredit yang hanya mengandalkan fasilitas kredit UMKM di bawah kementerian/lembaga, termasuk KUR, kurang efektif. Total KUR 2019 sebesar Rp. 129,5 triliun. Total kredit UMKM di bank umum pada 2019 senilai Rp1.150 triliun. Jadi, porsi KUR dari total kredit UMKM hanya 11,2%. Jadi sangat kecil sekali

Strategi yang seharusnya di jalankan

Para pelaku bisnis tentunya harus bisa beradaptasi dengan perubahan saat ini dimana perilaku konsumen beralih dari offline ke online dengan signifikan sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini karena ketika status wabah virus corona atau Covid-19 menjadi pandemi, pemerintah menghimbau agar masyarakat berkegiatan di rumah saja sebagai upaya mitigasi, sehingga pengunjung pusat perbelanjaan turun hingga 50%.

Para pelaku UMKM harus menyusun strategi digital sebagai bagian dari adaptasi untuk dapat bertahan dan juga tetap berkembang dalam kondisi saat ini.

Dalam strategi digital ada tiga poin yang esensial, yaitu konten, data base dan ads. Dalam hal konten, para UMKM harus mampu membuat konten yang menarik dan sesuai dengan target market. Memanfaatkan hal yang sedang populer juga dapat meningkatkan engagement audience terhadap konten.

UMKM juga harus mengumpulkan dan menganalisa database karena berfungsi untuk memaksimalkan promo kepada audience yang tepat. Selanjutnya, ads atau iklan untuk promosi juga harus dilakukan karena berguna untuk memperluas capaian konten yang dibuat melalui digital kepada user baru di luar database yang masih sesuai dengan target market.

Berbagai jenis taktik dan strategi digital marketing pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mempromosikan sebuah produk atau jasa untuk meningkatkan brand awareness yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pembelian.

Melakukan soft selling saat memiliki produk baru, yaitu dengan cara merilis teaser produk. Lalu membuat trailer yang berisi product knowledge, harga, tanggal launching. Lalu buat timeline seperti pre-order dan sebagainya.

Selain itu di masa seperti ini penting untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat bergerak lebih cepat dan efektif. Namun hal yang perlu di ingat adalah dapat mencari partner yang tepat dan sesuai dengan visi misi bersama. Dengan keadaan new normal ini, di anggap permanen. Yang harus dipersiapkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menghadapi the new normal sekarang adalah punya speed yang jauh lebih cepat.

Dalam bidang usaha agar audience dan masyarakat luas mendapatkan informasi, inspirasi, bahkan solusi dalam kondisi pandemi saat ini. Bidang kewirausahaan adalah salah satu yang harus terus didukung karena menopang perekonomian nasional.

Dalam meningkatkan bisnis UMKM, JNE pun kini meluncurkan COD Retail, yaitu produk layanan untuk mempermudah aktifitas jual beli online diluar online marketplace. Hal ini guna untuk memudahkan masyarakat dalam membeli barang kebutuhan secara online dan mendorong bisnis UMKM agar dapat terus berkembang di tengah pandemic covid-19 dalam masa menhadapi New Normal.

Sebelumnya. JNE juga telah mewujudkan dukungan terhadap UKM di tengah pandemi covid-19, antara lain, memberikan diskon 50% khusus untuk pengiriman masker dan diskon 50% untuk pengiriman khusus APD (Alat Pelindung Diri) dengan menggunakan layanan JTR pada bulan April lalu. Begitu juga dengan bantuan pengiriman APD dan sembako yang di galang atau di donasikan berbagai pihak yang hingga kini telah mencapai lebih dari 30 ton untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah strategis dan sentral diantaranya karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Padahal UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif dan kurang terarah. Padahal UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan perannya di perekonomian Indonesia kurang maksimal sehingga perlu mendapatkan penanganan yang serius. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM dengan cara mengupayakan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Saran

Pertama, pemerintah harus melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar relaksasi kredit bisa menyeluruh ke semua bank umum dan BPR. Kedua, kewajiban pemerintah daerah menjadi penopang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini harus clear. Kebijakannya seperti apa. Jangan membuat bingung level teknis di bawah. Pemerintah harus segera rampungkan peraturan teknisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.kompasiana.com/ratripurwasih/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-5520e43ea33311614a46cdb1>
- <http://nitaratnasari94.blogspot.co.id/2013/05/peran-ukm-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Tambunan, Tulus. 2012. Perekonomian Indonesia. Bogor:Gahlia Indonesia
- Nugrahani, Tri Siwi.dkk. 2015. Model Pendampingan: Upaya Mengurangi Kemiskinan. Yogyakarta: Litera Yogyakarta
- Hadiyati, Ernani. 2009. Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 11 (2): 183-192.
- Tambunan, Tulus. 2009. UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) di Indonesia dan Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adiningsih, Sri. 2009. Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Afifah, Nunuy Nur. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. Jurnal Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Edy Sutrisno.2011. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta: Prenada Media Group.
- Fitriati, Rachma. 2015. Menguak Daya Saing UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) Industri Kreatif. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Alwasilah, Chaedar. 2000. Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya
- Caroline, Bryan and White, Louise G. 1996. Manajemen Pembangunan untuk negara berkembang. Terjemahan Rusyianto.L.Simatupang. Jakarta: LP3ES
- Sedarmayanti.2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: Mandar Maju.
- Ndraha, Talidzuhu. 1990. Pembangunan Masyarakat. Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas Jakarta: Rineka Cipta.
- Nitisusastro, Mulyadi 2010 Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung
- Primiana, Ina 2009. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Alfabeta, Bandung, Indonesia. Radyati, Maria R